**ANALISIS *VALUE FOR MONEY* PADA KINERJA DINAS CIPTA KARYA,
BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Mulyati Akib¹, Safaruddin², Sri Febriyanti Zakinah³

**Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari
Sulawesi Tenggara**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja *value for money* pada Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja *value for money* pada Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara ditinjau dari tahun 2017-2019, dinilai sudah ekonomis dan efisien dilihat dari susunan anggaran yang telah dilaksanakan dengan baik, karena belanja yang direalisasikan lebih sedikit dibandingkan dengan apa yang dianggarkan, dimana dari unsur anggaran belanja tersebut yang memberikan kontribusi paling banyak yaitu belanja langsung yang terdiri dari belanja barang dan jasa, belanja pegawai dan belanja modal. Namun pada rasio efektivitas dinilai tidak efektif, karena adanya program/kegiatan yang tidak terlaksanakan.

Kata kunci: Kinerja, *Value For Money*, Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas.

ABSTRACT

This research aims to find out the performance of value for money in the Departement of Creation, Construction and Spatial Planning of Southeast Sulawesi Province. The data used is primary and secondary data with the data collection method in this study, namely interviews and documentation. The data analysis used is descriptive analysis. The results of this study showed that the performance of value for money in the Departement of Creation, Construction and Spatial Of Southeast Sulawesi Province was reviewed from 2017-2019, considered to be economical and efficient judging by the composition of the budget that has been implemented well, because the realized spending is less than what is budgeted, which from the element of the budget that provides the most contribution, namely direct spending consisting of goods and services, employee spending and capital expenditures. However, the effectiveness ratio is considered ineffective, due to programs/activities that are not carried out.

Keywords: Performance, Value For Money, Economical, Efficient, and Effective.

I. PENDAHULUAN

Di era globalisasi saat ini, tujuan pembangunan baik di tingkat kota maupun daerah yakni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia. Hal ini berdasarkan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "...untuk memajukan kesejahteraan umum". Dengan adanya pembangunan daerah diharapkan tiap-tiap pemerintah daerah dapat mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan pengembangan sektor perekonomian serta memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Otonomi Daerah di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang No.22 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Secara umum, otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengelola sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya, dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan.

Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan berbasis *value for money* yaitu ekonomis, efisien dan efektif yang mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, dan meningkatkan pemerataan serta keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. APBD menjadi acuan Pemerintah Daerah dalam mengukur seberapa besar pencapaian pemerintah daerah yang didasari prinsip 3E (ekonomis, efisiensi, efektivitas) sehingga mampu menyejahterakan masyarakatnya lewat penyelenggaraan otonomi daerah dalam perwujudan *Good Governance* dan akuntabilitas pada lingkup Pemerintahan dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara resmi menyusun laporan keuangannya sendiri mulai tahun 2017 yang di tahun sebelumnya laporan anggarannya masih terakumulasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sulawesi Tenggara. Daya serap anggaran belanja Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara dari tahun 2017-2019 mengalami fluktuasi. Berdasarkan laporan keuangan Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017-2019 yang dilampirkan, pada tahun 2017 memiliki daya serap sebesar 90% dari anggaran yang

telah ditetapkan, kemudian pada tahun 2018 memiliki daya serap sebesar 78% dari besaran anggarannya serta tahun 2019 memiliki daya serapan dari anggarannya sebesar 90%.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja *Value For Money* pada Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara.

II. LANDASAN TEORI

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Perspektif teori agensi merupakan dasar yang digunakan memahami isu *corporate governance* dan *earning management*. Penerapan *corporate governance* berdasarkan pada teori agensi, yaitu teori agensi dapat dijelaskan dengan hubungan antara manajemen dengan pemilik, manajemen sebagai agen secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (principal) dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi yang sesuai dengan kontrak. Dalam teori keagenan menjelaskan tentang dua pelaku ekonomi yang saling bertentangan yaitu prinsipal dan agen. Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal (Ichsan, 2013).

Jika prinsipal dan agen memiliki tujuan yang sama maka agen akan mendukung dan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh prinsipal. Teori Agensi mendasari Manajemen laba sehingga setiap individu cenderung untuk memaksimalkan utilitasnya. Konsep *Agency Theory* adalah hubungan atau kontrak antara principal dan agent. Principal memperkerjakan agent untuk melakukan tugas dalam rangka memenuhi kepentingan principal. Kesimpulan dari pembahasan diatas yaitu *Agency Theory* mendasarkan hubungan kontrak antar anggota-anggota dalam perusahaan dimana prinsipal dan agen sebagai pelaku utama. Prinsipal merupakan pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama prinsipal, sedangkan agen merupakan pihak yang diberi amanat oleh prinsipal untuk menjalankan perusahaan. Agen berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanat oleh prinsipal kepadanya.

Akuntansi Sektor Publik

Mardiasmo (2018:2) menyatakan akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan-badan pemerintahan (pemerintah pusat dan daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik negara (BUMN dan BUMD), yayasan, organisasi politik dan organisasi massa

(ORMAS), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), universitas, dan organisasi nirlaba lainnya.

Berdasarkan pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa pengertian akuntansi sektor publik merupakan proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian dan analisis laporan transaksi keuangan untuk organisasi sektor publik. Akuntansi sektor publik berbeda dengan yang dilakukan pada sektor swasta, karena negara khususnya lembaga pemerintah memiliki standar akuntansi sendiri. Penerapan akuntansi sektor publik dalam meningkatkan kinerja pemerintah yaitu akuntansi publik dapat dijadikan sebagai alat bagi pemerintah untuk mengukur kinerjanya, dengan melihat seberapa besar dana yang telah mereka habiskan dan seberapa jauh progres yang dicapai atas penggunaan dana tersebut.

Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi sektor publik dibedakan atas Akuntansi Pemerintah dan Akuntansi Sosial. Nordiawan, Putra dan Rahmawati (2012:4) menjelaskan Akuntansi Pemerintah mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di Badan Pemerintah. Didalam sistem akuntansi pemerintah, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah yang menyangkut organisasi pemerintah dan organisasi-organisasi lain yang tidak bertujuan mencari laba (*non-profit organization*). Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah perlu mengatur standar akuntansi pemerintahan daerah agar dapat digunakan secara seragam di seluruh pemerintahan daerah. Akuntansi pemerintah menggunakan beberapa basis akuntansi yaitu dimulai dari basis kas, dilanjutkan dengan basis kas menuju akrual dan basis akrual.

Kinerja Pemerintahan

Pengertian Kinerja

Menurut Sandy (2015:12) memberikan pengertian bahwa kinerja atau prestasi kerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan disepakati bersama. Sedangkan menurut moheriono (2012:95) menyatakan bahwa kinerja atau *performance* merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi. Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja berkaitan erat dengan hasil pekerjaan atau pencapaian seseorang atau organisasi dan hasil tersebut dapat berkaitan dengan kualitas, kuantitas maupun ketepatan waktu.

Nurlaila (2010:71), “kinerja atau *performance* merupakan hasil atau keluaran (*output*) dari suatu proses”. Menurut Syafrial (2012:37), kinerja merupakan kuantitas dan kualitas pekerjaan yang diselesaikan oleh individu, kelompok, atau organisasi. Pada

sektor pemerintahan, kinerja dapat diartikan sebagai suatu prestasi yang dicapai oleh pegawai pemerintahan atau instansi pemerintahan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam suatu periode. Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja berkaitan erat dengan hasil pekerjaan atau pencapaian seseorang atau organisasi dan hasil tersebut dapat berkaitan dengan kualitas, kuantitas maupun ketepatan waktu.

Kinerja Aparatur

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Aparatur Sipil Negara adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah. Sebagai unsur aparatur negara perlu dilihat kualitas Pegawai Negeri Sipil agar dapat dikembangkan suatu sistem pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang mampu menghadapi persaingan ditingkat regional maupun global. Kinerja aparatur menurut Mangkunegara (2011:67), Kinerja Aparatur adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Berdasarkan pengertian diatas, maka aparatur pemerintah merupakan seseorang yang digaji oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dengan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian dalam melaksanakan tugas-tugasnya tersebut harus dilandasi dengan rasa tanggung jawab, agar tercipta kualitas kinerja yang baik dan optimal serta dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat pada umumnya.

Arti Penting Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Chabib Soleh dan Suripto (2011:5) Arti penting kinerja pemerintah daerah di bagi menjadi enam bagian yaitu:

1. Sebagai umpan balik bagi Kepala Daerah untuk memperbaiki kinerja Pemerintah Daerah dimasa yang akan datang;
2. Untuk menemukan kembali SKPD mana yang memberikan kontribusi terbesar dan SKPD mana yang kurang dalam memberikan kontribusi terhadap proses pencapaian visi Kepala Daerah serta mengidentifikasi berbagai faktor penyebab keberhasilan dan kurangberhasilan dari setiap SKPD;
3. Untuk membangkitkan motivasi kerja Kepala SKPD dan jajarannya agar bekerja lebih produktif;
4. Untuk merumuskan kembali kebijakan, program dan kegiatan yang dinilai lebih efektif berikut penganggarnya serta metode/teknik pelaksanaan yang lebih efisien dalam proses pencapaian visi.
5. Melalui laporan kinerja, pemerintah daerah menginformasikan tingkat keberhasilan/kegagalannya secara jujur serta menjelaskan berbagai faktor

kegagalannya baik kepada masyarakat, kepada para pemberi donasi, kepada DPRD dan kepada pemerintah tingkat di atasnya.

6. Meningkatkan derajat kepercayaan kepada masyarakat, bahwa dana publik yang dipercayakan kepadanya, telah dipergunakan sesuai amanat yang diberikan.

Value For Money

Value for money adalah suatu konsep penilaian kinerja suatu organisasi sektor publik berdasarkan tingkat keberhasilan suatu program kerja mengacu kepada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Melalui konsep *value for money* memberikan informasi berupa indikator apakah anggaran (dana) yang dibelanjakan menghasilkan nilai tertentu bagi masyarakatnya. *Value for Money* adalah suatu konsep untuk menilai kinerja suatu organisasi sektor publik yang tidak hanya di tinjau dari aspek keuangan saja, tetapi juga dapat ditinjau dari non keuangan untuk menilai tingkat keberhasilan suatu program kerja sektor publik.

Melalui metode *value for money*, selain penilaian finansial, terdapat pula penilaian kinerja yang bersifat non finansial, yaitu penilaian pada kualitas pelayanan dengan memperhatikan kualitas yang konsisten, yakni memenuhi ekspektasi pelanggan sasaran. Dari beberapa penjelasan diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa *Value for money* merupakan suatu cara menilai apakah suatu organisasi telah memperoleh tujuan yang diharapkan atau belum dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan. Reformasi penataan keuangan negara saat ini menghendaki penerapan konsep *value for money* atau yang lebih dikenal dengan konsep 3E (Ekonomi, Efisien, dan Efektif).

Indikator *Value For Money*

Menurut Mardiasmo (2009: 130), tuntutan masyarakat dalam *value for money* adalah ekonomis (hemat) dalam pengadaan alokasi sumber daya, efisiensi dalam arti bahwa penggunaan/pengorbanannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif (berhasil guna) dalam arti pencapaian tujuan sasaran. Peranan indikator kinerja pada *value for money* adalah untuk menyediakan informasi sebagai pertimbangan untuk pembuatan keputusan.

Indikator *value for money* dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. Indikator alokasi biaya (ekonomis dan efisiensi)

Ekonomis artinya pembelian barang dan jasa dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik (*spending less*). Efisiensi artinya *output* tertentu dapat dicapai dengan sumber daya yang serendah-rendahnya (*spending well*).

- b. Indikator kualitas pelayanan (efektivitas)

Efektivitas artinya kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan (*spending wisely*).

Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan *Value For Money*

Value for money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah dan sektor publik. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi *output* yang dihasilkan semata, akan tetapi secara terintegrasi harus mempertimbangkan *input*, *output*, dan *outcome* secara bersama-sama. Permasalahan yang sering muncul adalah sulitnya mengukur *output* karena *output* yang dihasilkan pemerintah tidak selalu berupa *output* yang berwujud (*tangible output*), tetapi kebanyakan juga bersifat *output* tidak berwujud (*intangible output*). Ukuran kinerja pada dasarnya berbeda dengan indikator kinerja. Perbedaan antara ukuran kinerja dengan indikator kinerja adalah:

- a. Ukuran kinerja, Umumnya mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, misalnya: laporan keuangan pemerintah.
- b. Indikator kinerja, Mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung, yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja.

Mekanisme penentuan indikator kinerja membutuhkan:

- a. Sistem perencanaan dan pengendalian. Meliputi proses, prosedur, dan struktur yang memberi jaminan bahwa tujuan organisasi telah dijelaskan dan dikomunikasikan keseluruh bagian organisasi dengan menggunakan rantai komando.
- b. Spesifikasi teknis dan standarisasi. Spesifikasi ini digunakan sebagai ukuran kinerja kegiatan, program dan organisasi.
- c. Kompetensi teknis dan profesionalisme. Personil yang memiliki kompetensi dan profesional merupakan jaminan dukungan dalam pekerjaan.
- d. Mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar. Mekanisme ekonomi terkait dengan pemberian reward dan punishment yang bersifat finansial.
- e. Sedangkan mekanisme pasar terkait dengan penggunaan sumber daya. Mekanisme ini digunakan untuk memperbaiki kinerja personil dan organisasi.

Anggaran

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pernyataan Nomor 2 menyatakan definisi anggaran yaitu: anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. Definisi lain yang dikemukakan oleh M. Marsono pada bukunya "Tata Usaha Perbendaharaan Republik Indonesia" dalam Halim dan Iqbal (2012:138) memberikan definisi bahwa anggaran adalah suatu rencana pekerjaan yang pada suatu pihak mengandung jumlah pengeluaran yang setinggi-tingginya yang mungkin diperlukan untuk membiayai kepentingan Negara pada suatu masa depan, dan pihak lain perkiraan pendapatan (penerimaan) yang mungkin akan dapat diterima dalam masa tersebut. Menurut M. Nafarin (2012:19) mengemukakan bahwa: "Anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang".

Anggaran terdiri dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dengan periode Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, terhitung dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan alat utama pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya dan sekaligus alat pemerintah untuk mengelola perekonomian negara. Sebagai alat pemerintah, APBN bukan hanya menyangkut keputusan ekonomi, namun juga menyangkut keputusan politik. Dalam konteks ini, DPR dengan hak legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang dimilikinya perlu lebih berperan dalam mengawal APBN sehingga APBN benar-benar dapat secara efektif menjadi instrumen untuk mensejahterakan rakyat dan mengelola perekonomian negara dengan baik. Anggaran Belanja adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara. Objek penelitian ini yaitu kinerja *value for money* Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif dalam penelitian ini yaitu berupa rekap laporan fisik Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara, dan data kualitatif data, dokumen dan hasil wawancara di Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang dihasilkan penelitian ini adalah hasil wawancara dengan staf bagian keuangan berupa rekap laporan fisik keuangan Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2017-2019 sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen berupa gambaran umum Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara dan rekap laporan fisik keuangan tahun 2017-2019.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 1) wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada pihak yang berwenang. 2) Dokumentasi, sebagai suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan berupa rekap laporan fisik keuangan tahun 2017-2019, dan data yang didapatkan berupa gambaran umum Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi Dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode Analisis Deskriptif. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini

dengan menyajikan angka, tabel dan uraian penjelasan pengukuran pelaksanaan anggaran belanja dengan menggunakan pengukuran *value for money* pada anggaran dan realisasi belanja Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2017-2019, berikut pengukuran *value for money* anggaran belanja :

1. Pengukuran Rasio Ekonomis

$$Ekonomis = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\%$$

2. Pengukuran Rasio Efisien

$$Efisiensi = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

3. Pengukuran Rasio Efektivitas

$$Efektivitas = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Sumber: Mahsun (2014)

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara mengenai tingkat ekonomis, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2017-2019 dalam menilai kinerja Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara menggunakan *Value For Money* rasio ekonomis, efisiensi dan rasio efektivitas sebagai berikut.

Analisis Rasio Ekonomis

Rasio ekonomis menekankan pada input atau biaya. Mengukur tingkat ekonomis yaitu dengan membandingkan antara biaya pengeluaran yang dianggarkan dengan realisasi biaya yang telah dikeluarkan sebelumnya. Pengukuran kinerja Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara tolak ukur yang digunakan adalah anggaran dan realisasi sesuai dengan indikator ekonomis yaitu membandingkan realisasi pengeluaran dengan anggaran. Hasil perhitungan rasio ekonomis disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.2 Hasil Perhitungan Tingkat Ekonomis Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017-2019

Tahun	Anggaran Pengeluaran (Rp)	Realisasi Pengeluaran (Rp)	Rasio Efisiensi (%)	Kriteria
2017	195.258.113.153	175.736.099.379	90	Ekonomis
2018	119.322.063.897	93.829.317.556	78,63	Ekonomis
2019	223.217.663.901	201.976.184.013	90,48	Ekonomis

Sumber: Data diolah 2021.

Berdasarkan tabel diatas, Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara dari tahun 2017-2019 cukup konsisten berada pada kategori ekonomis, walaupun terjadi fluktuasi persentase setiap tahunnya. Pada tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 11,3%, yaitu dari 90% menjadi 78,63%. Pada tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 11,85%, yaitu dari 78,63% menjadi 90,48%.

Analisis Rasio Efisiensi

Efisiensi berhubungan dengan pengukuran seberapa besar cara yang digunakan untuk membandingkan antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan (cost of output). Suatu kegiatan operasional dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah- rendahnya (spending well). Pengukuran kinerja Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara tolak ukur yang digunakan adalah membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja. Hasil perhitungan rasio efisiensi disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.3 Hasil Perhitungan Tingkat Efisiensi Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017-2019

Tahun	Realisasi Anggaran Belanja Langsung (Rp)	Realisasi Anggaran Belanja (Rp)	Rasio Efisiensi (%)	Kriteria
2017	170.419.902.524	175.736.099.379	96,97	Efisien
2018	86.212.293.506	93.829.317.556	91,88	Efisien
2019	193.190.384.513	201.976.184.013	95,65	Efisien

Sumber: Data diolah 2021.

Berdasarkan tingkat efisiensi anggaran belanja Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara pada tiga tahun berturut-turut mengalami fluktuasi. Perkembangan tingkat efisiensi pada tahun 2017-2019 dikatakan efisien dimana pada tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 5,09%, yaitu dari 96,97% menjadi 91,88%. Pada tahun 2018 ke tahun 2019 kembali mengalami kenaikan sebesar 3,77%, yaitu dari 91,88% menjadi 95,65%.

Analisis Rasio Efektivitas

Efektivitas merupakan perbandingan antara hasil yang diharapkan (target) dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas anggaran dapat diukur dengan rasio antara

relisasi anggaran belanja dan target anggaran belanja . keberhasilan suatu organisasi usaha mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara tolak ukur yang digunakan adalah rasio antara realisasi anggaran belanja dan target anggaran belanja. Hasil perhitungan rasio efektivitas disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.4 Hasil Perhitungan Tingkat Efisiensi Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017-2019

Tahun	Target Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Anggaran Belanja (Rp)	Rasio Efisiensi (%)	Kriteria
2017	195.258.113.153	175.736.099.379	90	Tidak Efektif
2018	119.322.063.897	93.829.317.556	78,63	Tidak Efektif
2019	223.217.663.901	201.976.184.013	90,48	Tidak Efektif

Sumber: Data diolah 2021.

Berdasarkan tingkat efektivitas yang dilakukan Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Secara keseluruhan, tahun 2017-2019 dengan nilai rasio 90%, 78,63%, 90,48% rasio efektivitas bernilai <100% menunjukkan bahwa kinerja Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara dinilai tidak efektif.

Pembahasan

Analisis Kinerja Ditinjau Dari Rasio Ekonomis

Kinerja pemerintah daerah dikatakan ekonomis apabila rasio yang dicapai kurang dari seratus persen. Semakin kecil rasio ekonomi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Kriteria ekonomi dalam pengukuran kinerja diklasifikasikan sesuai dengan persentase penilaian sebagai berikut: (1) jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti ekonomis (2) jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti ekonomis berimbang (3) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti tidak ekonomis. Perkembangan rasio ekonomi Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara dari tahun 2017-2019 cukup konsisten berada pada kategori ekonomis, walaupun terjadi fluktuasi persentase setiap tahunnya.

Hasil analisis dengan menggunakan perhitungan rasio ekonomi dari tahun 2017-2019 kinerja Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara telah berhasil menunjukkan kinerja yang baik. Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan konsep *Value For Money* dikatakan ekonomis, karena belanja yang direalisasikan lebih sedikit dibandingkan dengan yang dianggarkan, dimana dari unsur anggaran belanja tersebut yang memberikan kontribusi paling banyak yaitu belanja langsung yang terdiri dari belanja barang dan jasa, belanja pegawai dan belanja modal. Hal ini membuktikan bahwa Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara dapat meminimalisir sumber daya yang digunakan dengan menghindari pengeluaran

yang boros dan tidak produktif dan mengurangi biaya yang tidak diperlukan serta dalam hal pengadaan dan alokasi sumber daya yang dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Analisis Kinerja Ditinjau Dari Rasio Efisiensi

Kinerja pemerintah daerah dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari seratus persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Kriteria efisien dalam pengukuran kinerja diklasifikasikan sesuai dengan persentase penilaian sebagai berikut: (1) jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti efisien (2) jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti efisien berimbang (3) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti tidak efisien. Perkembangan rasio efisiensi Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara dari tahun 2017-2019 berada pada kategori efisien, walaupun terjadi fluktuasi persentase setiap tahunnya.

Hasil analisis dengan menggunakan perhitungan rasio efisiensi dari tahun 2017-2019 kinerja Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara telah berhasil menunjukkan kinerja yang baik. Kinerja Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan konsep *Value For Money* dikatakan efisien, karena berhasil menghemat dana dalam pengelolaan anggaran belanja, dimana anggaran belanja langsung yang sudah termaksud efisien terdiri dari belanja barang dan jasa, belanja pegawai, dan belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara mampu menggunakan sumber daya yang diperlukan dengan minimum untuk mencapai target yang maksimum.

Analisis Kinerja Ditinjau Dari Rasio Efektivitas

Kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai lebih dari seratus persen. Semakin tinggi rasio efektivitas yang didapat, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah tersebut. Kriteria efektivitas dalam pengukuran kinerja diklasifikasikan sesuai dengan persentase penilaian sebagai berikut: (1) jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti tidak efektif (2) jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti efektivitas berimbang (3) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti efektif. Perkembangan rasio efektivitas Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara dari tahun 2017-2019 berada pada kategori tidak efektif.

Hasil analisis dengan menggunakan perhitungan rasio efektivitas kinerja Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan konsep *Value For Money* dikatakan tidak efektif, disebabkan adanya kegiatan yang dianggarkan tetapi tidak dilaksanakan sebagaimana dilampirkan pada tabel 1.2, pada Tabel 4.4 menunjukkan bahwa rincian realisasi anggaran tidak mendapatkan pencapaian yang maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara pada bagian kasubag keuangan Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara diatas dapat dilihat bahwa masih ada anggaran yang belum terealisasi dikarenakan keterlambatan dalam penyusunan dan pencairan anggaran, hal ini terjadi dari pengurusan kontrak, kendala proyek dilapangan kadang progresnya yang telat, dan yang paling banyak kendala di pengurusan berkas pencairan dimana berkas tersebut tidak lengkap.

V. KESIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN, REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan metode Value For Money terhadap penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017-2019 dinilai sudah Ekonomis dan Efisien dengan hasil perhitungan rasio ekonomis dan rasio efisiensi menghasilkan rasio kurang dari 100% hal ini menunjukkan kinerja Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara sudah baik. Pada analisis rasio efektivitas, kinerja Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2017-2019 dinilai tidak efektif dikarenakan rasio efektivitasnya kurang dari 100%, hal ini disebabkan adanya program/kegiatan yang belum dilaksanakan.

Implikasi

1. Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman baru tentang kondisi yang sebenarnya mengenai kinerja *value for money* pada Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Bagi Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil analisis tentang kinerja *value for money* dengan menggunakan rasio ekonomis, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas dan memberikan saran serta masukan terkait kinerja *value for money* pada Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara.

Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menggunakan data tiga tahun terakhir yaitu tahun 2017-2019.
2. Penelitian ini dilakukan pada masa Pandemi Covid-19.

Rekomendasi

Adapun beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, antara lain:

1. Bagi Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam konsep *value for money* dengan rasio efektivitas diharapkan bisa meningkatkan kembali kinerjanya dengan memperhatikan beberapa berkas dan lebih

meninjau penentuan target-target selanjutnya sehingga dapat menyusun strategi yang tepat agar tercapainya tujuan pembangunan diharapkan.

2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk memperbanyak menggunakan data sehingga dapat mengetahui informasi lebih luas dan mendalami mengenai faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan program/kegiatan pada Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

- Chabib, Soleh, dan Suropto. 2011. *Menilai Kinerja Pemerintah Daerah*. Fokus Media. Bandung.
- Dedi Nordiawan. 2012. *Anggaran disuatu pemerintahan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Fitria Ayu Lestari Niu, Herman Karamoy, Steven Tangkuman .(2014). Analisis Penerapan PP. No. 71 Tahun 2010 dalam Penyajian Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kotamabagu. *Junal EMBA*. Vol.2 No.4 Desember 2014, 714-722. ISSN 2303-1174.
- Ichsan, Randhy. 2013. "Teori Keagenan (Agency Theory)." *12 Januari*. <https://bungrandhy.wordpress.com/2013/01/12/teori-keagenan-agencytheory/>, Diakses tanggal 20 Februari 2021 pkl 20.00 WITA.
- Mahsun, Mohamad. 2013. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE: Yogyakarta.
- Mahsun, Mohamad. 2014. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Mangkunegara. 2011. *Manajemen Sumber Daya Perusahaan*. PT . Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Mardiasmo, 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Terbaru. ANDI, Yogyakarta.
- Mardiasmo.2009. *Akuntansi Sektor Publik*. UPPSTIM YKPN: Yogyakarta.
- Nafarin. M,. 2012. *Penganggaran Perusahaan*. Salemba empat. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.